

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Ali, H. Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka cipta.
- Asikin, Z. 2018. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Pranada Media Group.
- Bachtiar. 2019. *Metode penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Effendi, Junaedi. Dkk. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Depok : Prenadamedia Group.
- Harahap. Y. 2017. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Jogiyanto Hartono, M. 2018. *Metode Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data*. Penerbit Andi.
- Mariza, Prima Idwan & Christian Orchard Tharanon Perangin-angin. 2022. *Peranan Jaksa Pengacara Negara: Mengawal Aset Perkebunan Negara di Sumatra Utara*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Maringka, J. S. 2022. *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*. Sinar Grafika.
- Marwan Effendy, 2010. *Kejaksaan Dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Timpani Publishing.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

- Muhammad Syahrums, S. T. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Mukti Fajar ND, Y. A. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rahim, MIF, SH, M., Rahim, A., SH, M., Guwi, J., & SH, M. 2020. *Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah-Rajawali Pers*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Raharjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramadhan, M. 2021. *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Santoso, Aris P.A. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Soekanto, Soerjono., 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.
- Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti dan Tjitrosoedibio. 2015. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (MixMethods)*. Bandung: Alfabeta.
- Surachman, E.R. 2022. *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi di Berbagai Negara (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Swarjana, I.K., & SKM, M. 2022. *Populasi Sampel, Teknik Sampling dan Bias Dalam Penelitian*. Penerbit Andi
- Viswandro, Matilda, Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum: Buku Rujukan Berkariir di Bidang Hukum*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Waluyo. Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

ARTIKEL DALAM JURNAL

- Afzulkifli, M. 2022. Penyelesaian Tunggalan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja. *Lex Lata*, Volume 2, No. 2 tahun 2022.

- Aliska, S., Safriadi, N., & Prihartini, N. 2018. Sistem Informasi dan Manajemen Pemberkasan Perkara di Kejaksaan Negeri Mempawah. *JUSTIN (Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi)*, Volume 6, No. 1, tahun 2018.
- Amaliyah, A., & Istiqamah, I. 2021. Eksistensi Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Alauddin Law Development Journal*, Volume 3, No.2 tahun 2021.
- Ansari, M. I., & Hadi, I. K. 2013. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Jaksa di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 15, No. 2 tahun 2013.
- Dasan, A. dkk. 2022. Peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dalam Memberikan Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Volume 7, No. 1 tahun 2022.
- Dewi N. M. T. 2021. Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Analisis Hukum*, Volume 5, No. 1 tahun 2021.
- Fitriani, R. 2017. Aspek hukum legalitas perusahaan atau badan usaha dalam kegiatan bisnis. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 12, No. 1 tahun 2017.
- Hapsari, D., Erna, N. K., & Sugama, I. 2019. Upaya Mediasi Oleh Jaksa Sebagai Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Wanprestasi Tunggakan Pembayaran Listrik Negara. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Volume 8, No. 11 tahun 2019.
- Ilmi, M., & Suhaimi, E. 2022. Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja: Studi Kasus pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Ceger. *Law Dewantara*, Volume 2, No.1 tahun 2022.
- Niagara, S. G. & Hidayat, C. N. 2020. Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Surya Kencana Dua*, Volume 7, No. 1 tahun 2020.

- Prabaningtyas, G. A. A., Budiarta, N. P., & Widyantara, I. M. M. 2021. Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Menyelesaikan Kasus Mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Denpasar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume 2, No. 3 tahun 2021.
- Putra, A. K., Rani, F. A., & Syahbandir, M. 2017. Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian pada Kejaksaan Tinggi Aceh). *Syah Kuala Law Journal*, Volume 1, No. 2 tahun 2017.
- Renwarin M.K, Asmaniar, Sharon G. 2023. Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Jika Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai. *Jurnal Krisna Law*, Volume 5, No. 1 tahun 2023.
- Rosita, D. 2018. Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 3, No. 1 tahun 2018.
- Ruchimat, T. 2021. Analisis Tentang Keabsahan Kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Dalam Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan BPJS Kesehatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 4, No.1 tahun 2021.
- Simanjuntak, J. 2018. Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara(TUN). *Lex Administratum*, Volume 6, No.1 tahun 2018.
- Sonata, D. L. 2014. Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, No. 1 tahun 2014.
- Sugama, I. D. G D. & Hapsari, N. K. E. D. 2019. Upaya Mediasi oleh Jaksa Sebagai Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Wanprestasi Tunggakan Pembayaran Listrik Negara. *Jurnal Harian Regional*, Volume 8, No. 11 tahun 2019.
- Wahyuni, Sri. 2020. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Non-Litigasi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 50, No. 2 tahun 2020.

Yusuf, M., Sampurno, S., Hasrul, M., & Arisaputra, M. I. 2018. Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, Volume 21, No. 2 tahun 2018.

ARTIKEL DALAM INTERNET

Aida Mardatillah. (2022). Mengulas Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara. Diakses pada 8 September 2023, <https://www.hukumonline.com>.

Alih Usman. (2022). Konsultasi Hukum Bagian Dua. Diakses pada 8 September 2023, <https://bpsdm-dev.kemenkumham.go.id>.

Finaka, A. W. (2018). Mengenal Lebih Dekat Kejaksaan RI. Diakses pada 21 Oktober 2023, <https://indonesiabaik.id>.

Hanif, R. N. F. (2020). Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi. Diakses pada 21 Oktober 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>.

Heriani, F. N. (2021). Tips Menyelesaikan Sengketa Perdata Secara Efektif dan Efisien. Diakses pada 23 November 2024, <https://www.hukumonline.com>.

Iqbal, T. S. (2022). Konsultasi Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa. Diakses pada 21 Oktober 2023, dari <https://kantorhukumjakarta.com>.

Kastori, R. (2023). Sengketa: Pengertian, Penyebab, dan Penyelesaiannya. Diakses pada 21 Oktober 2023, dari <https://www.kompas.com>.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Diakses pada 8 September 2023, dari <https://www.kejaksaan.go.id>.

Kejaksaan Negeri Buleleng. Diakses pada 8 September 2023, dari https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kabupaten_Buleleng.

Putu Indah Savitri. (2022). Kejagung Luncurkan Halo JPN, Konsultasi Masalah Hukum Gratis. Diakses pada 8 September 2023, dari <https://www.antaranews.com>.

Universitas Sains dan Teknologi Komputer. Diakses pada 8 September 2023, dari https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kabupaten_Buleleng.

Rumah.com. (2022). Litigasi: Penjelasan, Proses, Contoh, dan Bedanya dengan Non Litigasi. Diakses pada 21 Oktober 2023, dari <https://www.rumah.com>.

Wahyuni, W. (2022). Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Diakses pada 21 Oktober 2023, dari <https://www.hukumonline.com>.

SKRIPSI/TESIS

Ayyubie, Y. A. 2018. *Kedudukan Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Sebagai Jaksa Pengacara Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Studi Penelitian Pada Kejaksaan Negeri Serang)*, Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Lingga Agistin. 2022. *Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Perdata (Studi di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan)*, Sumatera Selatan: Universitas Sriwijaya.

Nurul Restu Azyanti. 2022. *Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara dalam Upaya Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Wanprestasi Tunggalan Pembayaran Listrik Negara (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)*, Lampung: Universitas Lampung.

Rahman, R. A. N. 2017. *Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Lampung: Universitas Lampung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu Pasal 1238 tentang Wanprestasi dan Pasal 1150-1160 tentang Gadai.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70).

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755).

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364).

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165).